

NASKAH PUBLIKASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK (TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN) DALAM PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2016

Aditya Widiyana

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Aditya.widiyana.2014@fisipol.umy.ac.id

NASKAH PUBLIKASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK (TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN) DALAM PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2016

Disusun oleh :

Aditya Widiyana

20140520205

Dosen Pembimbing


Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Titin Purwaningsih S.IP., M.Si



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

ABSTRAK

Program pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. Fokus dari penelitian ini adalah penguatan kelembagaan TKPK dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Untuk memperkuat kelembagaan TKPK sendiri diperlukan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan TKPK Kabupaten Bantul telah membuat prosedur penanganan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Namun ada kendala yaitu di tingkat desa yang tidak semua TPK Desa menjalankan program pengentasan kemiskinan. Maka dari itu diperlukan koordinasi yang lebih intens agar penguatan kelembagaan sampai ke tingkat desa.

Kata Kunci : Penguatan Kelembagaan, Kemiskinan, Koordinasi

Poverty alleviation program is one of the priorities for Bantul District Government. The focus of this research is the strengthening of TKPK institutions in accelerating poverty alleviation in Bantul District. To strengthen the TKPK institution itself required the coordination among institutions involved in poverty alleviation programs in Bantul District. This research uses qualitative method with interview and data collection. The result of this research is that in the framework of poverty eradication TKPK Bantul Regency has made the procedure of handling poverty aimed to reduce burden of expenditure of the poor. However, there are obstacles at the village level that not all TPK Desa run poverty alleviation programs. Therefore, more intense coordination is required in order to strengthen institutions to the village level.

Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang terjadi di beberapa negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang timbul dari berbagai akibat mulai dari ekonomi, sosial dan pengangguran yang ketiganya saling berkaitan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul pemerintah Kabupaten Bantul telah membuat dua arah kebijakan. Yang pertama koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak terkait, kedua meningkatkan produktifitas masyarakat miskin.

Untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul sendiri telah dibentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Bantul sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012. Tugas dan kewenangan dari TKPK yaitu mengkoordinasi antara SKPD terkait dan menyusun langkah-langkah yang konkrit dalam percepatan kemiskinan di daerah. Namun masih ada SKPD yang belum mengacu kepada aplikasi BDT (Basis Data Terpadu), yang mana BDT merupakan acuan yang digunakan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. Ada juga SKPD yang telat memberikan roadmap penanggulangan kemiskinan. Kedua permasalahan tersebut dikarenakan adanya mis komunikasi.

Metode penghitungan angka kemiskinan juga belum terunifikasi atau belum diseragamkan. Antara Dinas Sosial dan BPS memiliki versi masing-masing dalam penghitungan angka kemiskinan. Dari pendataan di

tingkat dusun sendiri juga belum optimal karena masih ada kader yang memasukkan warga mampu menjadi tidak mampu. Dari contoh pendataan tersebut yang terjadi di tingkat desa bisa dikatakan bahwa belum kuatnya kaderisasi hingga tingkat dusun. Karena salah satu tujuan dari TKPK Kabupaten Bantul ini menguatkan kelembagaan hingga ke tingkat dusun. Pekerjaan berat selanjutnya ada ditangan TKPK Kabupaten Bantul, bagaimana memastikan sistem-sistem yang telah dikembangkan ini bisa menjadi acuan untuk mengambil terkait keputusan atau program penanggulangan kemiskinan.

Kerangka Teori

Penguatan Kelembagaan

Menurut Muyungi (dalam, Mutiarin 2014) terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan perkuatan kelembagaan yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
2. Penguatan institusi dengan menyempurnakan prosedur dan metode di dalam organisasi.
3. Penumbuhan kapasitas sistem seperti peraturan yang kondusif, penumbuhan sistem kesadaran, dan pengelolaan sistem lingkungan.

Sehingga dengan demikian, manusia, sistem dan prosedur menjadi tumpuan perkuatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan kapasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas

internal organisasi dalam menjalankan tupoksi mencapai visi misi dan merupakan rangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan (Mutiarin, 2014).

Koordinasi

Koordinasi menurut Terry dalam Syafiie (2013: 89) koordinasi sangat berperan vital dalam sebuah organisasi, kalau dibayangkan sebuah tim kerjasama maka koordinasi merupakan sebuah landasan bagi berjalannya suatu organisasi. Dalam melakukan koordinasi ada beberapa prinsip yang dilakukan, di antaranya :

1. Yang pertama dilakukan dengan cara kontak langsung yang bertujuan agar ada hubungan timbal balik supaya muncul pendapat-pendapat lainnya agar mencapai tujuan tertentu.
2. Prinsip kedua prinsip yang mengharuskan bahwa koordinasi harus dilakukan sebelum dilakukan sebuah program atau kebijakan. Prinsip kedua ini menghendaki bahwa koordinasi dilakukan saat awal perencanaan.
3. Prinsip ketiga, yaitu suatu hubungan yang dilakukan untuk membuka sifat kepekaan terhadap kritik dari bagian lain.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang multiface yang multidimensional. Menurut Kurniawan (dalam Khomsan, 2015) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan merupakan sebuah kekurangan dan

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

Menurut Suyanto (2013:3) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yakni :

1. Kemiskinan absolut : merupakan suatu dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang belum mencukupi untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, seperti : pendidikan, sandang, pangan dan kesehatan.
2. Kemiskinan relatif : kemiskinan ini dinyatakan dengan berapa tingkat pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok masyarakat kelas tertentu dibandingkan dengan proposi pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat dengan kelas pendapatan lainnya.
3. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sejak lahir, misalnya tidak mau memperbaiki keadaannya dan terlihat malas.
4. Kemiskinan struktural : timbulnya ketergantungan yang kuat dari kelas ekonominya yang lebih di atasnya. Menurut pendekatan ini mereka sangat sulit untuk merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Creswel dalam Raco (2010:7) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan yang berkompeten. Lokasi penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tepatnya dibagian Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang diajukan kepada TKPK Kabupaten Bantul. Teknik analisa data yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Penguatan Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016

Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai fungsi sebagai perencana dalam penguatan kelembagaan. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maka tujuan sebuah organisasi akan tercapai.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari TKPK Kabupaten Bantul sendiri telah berupaya memberikan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan pelatihan aplikasi SIMNANGKIS. Pelatihan ini diberikan kepada operator aplikasi di tingkat kecamatan dan desa. Dengan keberadaan aplikasi ini bertujuan agar program penanggulangan kemiskinan dapat termonitor oleh pihak yang terkait.

Motivasi Bekerja

Pada dasarnya organisasi bukan hanya mengharapkan pegawai yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Berkaitan dengan motivasi kerja dari para kader yang ada dapat memberi faktor lebih atau pendukung karena para kader yang ada di desa sangat antusias untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Dari TKPK Kabupaten Bantul juga telah memberikan hadiah bagi TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan) Desa yang mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.

Kendala Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ada beberapa kendala yang dialami dalam dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia, yaitu :

1. Pergantian personel anggota TPK Desa. Pergantian personel sendiri dilakukan setiap tiga tahun sekali.
2. Pergantian pemimpin desa.
3. Belum menganggarkan yang ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan.

Prosedur

Prosedur adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Berjalannya suatu tindakan atau prosedur ditentukan dari seberapa kuatnya koordinasi di dalam organisasi. TKPK

Kabupaten Bantul merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Prosedur Penanganan Kemiskinan

Prosedur penanganan kemiskinan dilakukan dengan dengan lima tahapan, diantaranya :

1. SKPD Kabupaten Bantul bersama TKPK membuat program mana saja yang diprioritaskan. Setelah ditentukan program pertama, kedua maupun kondisional maka SKPD akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
2. TKPK Kabupaten Bantul melakukan perannya untuk melakukan koordinasi antara SKPD dengan TPK Kecamatan hingga Dusun yang bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkrit guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
3. TPK Kecamatan melakukan pendataan potensi SDM maupun SDA yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Memberikan dukungan seperti menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan orang dengan pemberi bantuan.
4. TPK Desa mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin. Memberikan fasilitas koordinasi antar pihak yang berkaitan.
5. TPK Dusun melakukan pendataan, pendampingan dan pemantauan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Sinkronisasi Program

Untuk memperkuat sinkronisasi program antar SKPD maka TKPK Kabupaten Bantul merekomendasikan agar SKPD mengacu pada analisa :

- a. Analisis terhadap peta konsolidasi program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- b. Analisa tentang anggaran (belanja) untuk penanggulangan kemiskinan daerah.
- c. Analisis terhadap prioritas penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul saat akhir tahun. Untuk melakukan evaluasi program, TKPK Kabupaten Bantul menggunakan langkah-langkah yaitu dengan penyebaran kuesioner yang ditunjukkan kepada penerima bantuan, adapun pertanyaan yang diberikan kepada penerima bantuan diantaranya :

- a. Apakah sosialisasi pemanfaatan bantuan keuangan mudah dipahami ?
- b. Apakah waktu pelaksanaan sosialisasi bantuan keuangan sudah tepat ?
- c. Apakah jumlah bantuan keuangancukup ?
- d. Apakah bantuan keuangan khusus bermanfaat bagi peningkatan pendapatan saudara ?
- e. Apakah pendamping membantu saudara dalam memahami sosialisasi ?
- f. Apakah keberadaan pendamping bermanfaat bagi saudara ?

Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai sebuah strategi. Rencana staregis yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Berikut rencana strategis penanggulangan kemiskinan dari TKPK Kabupaten Bantul :

1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin

Dilakukan dengan membuat program PKH (Program Keluarga Harapan). Hak dari peserta program PKH menerima bantuan uang tunai, menerima pelayanan kesehatan bagi bayi dan ibu di puskesmas dan posyandu dan menerima pelayanan pendidikan wajib belajar selama 9 tahun.

Tabel 3.6

Komponen PKH Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016

Tahun 2015	Jumlah Bantuan Per Tahun	Tahun 2016	Jumlah Bantuan Per Tahun
Bantuan tetap	Rp. 500.000	Bantuan tetap	Rp. 500.000
Komponen kesehatan : Ibu menyusui atau hamil, Balita	Rp. 1.200.000	Komponen kesehatan : Ibu menyusui atau hamil, Balita	Rp. 1.200.000
Komponen pendidikan : 1. SD 2. SMP	Rp. 450.000 Rp. 750.000	Komponen pendidikan : 1. SD 2. SMP	Rp. 450.000 Rp. 750.000
Penyaluran	Tunai	Penyaluran	Non tunai

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin

Untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilakukan dengan membuat program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Agar KUBE dapat berjalan perlu diperlukan kepengurusan yang paham akan pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha yang dijalankan. Selain itu juga ada pelatihan yang diberikan dari pihak kabupaten kepada anggota KUBE. Selain itu juga diberikan bantuan keuangan sebesar Rp 7.500.000 setiap kelompok.

Visi Misi

Visi misi merupakan suatu statemen yang berisikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Visi misi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam tujuan untuk mencapai target. Untuk visi misi dari TKPK merupakan penjabaran dari visi misi RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul. Nantinya dari visi misi RPJMD tersebut akan dijabarkan dalam arah kebijakan serta capaian kinerja di tahun 2016.

Strategi dan arah kebijakan dari visi misi TKPK Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Satrategi dan arah kebijakan akan dijabarkan dalam tabel berikut

Strategi Dan Arah Kebijakan TKPK Kabupaten Bantul Tahun 2016

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Capaian Kinerja
1. Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka pengangguran	27.182 Jiwa
	2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Jumlah anggota keluarga sejahtera	186.400 Keluarga
	3. Validasi masyarakat miskin	1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat	Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial	137.927 Jiwa

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Dari outcome yang dihasilkan maka tidak semua mengalami keberhasilan. Ada dua outcome yang belum bisa dikatakan berhasil yaitu angka pengangguran dan jumlah keluarga sejahtera. Akan tetapi penyandang masalah kesejahteraan sosial menunjukkan angka keberhasilan.

Penutup

Kesimpulan

Pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan oleh TKPK hingga ke tingkat desa, seperti pelatihan aplikasi SIMNANGKIS dan berbagai workshop. Akan tetapi ditingkat TPK Desa mengalami kendala yang mana tidak semua program pengentasan kemiskinan dijalankan meskipun sudah ada Surat Keputusan. Untuk prosedur penanganan kemiskinan sendiri sudah cukup baik karena setiap lembaga yang terkait sudah ada pedoman dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan capaian kinerja yang dijabarkan dalam visi misi TKPK Kabupaten Bantul belum menunjukkan progres yang baik, karena masih ada program yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Khomsan, A dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklarifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Bogor.
- Mutiarin Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Raco,J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Startegi Penanganannya*. Malang: Intrans Publising.